

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Desa sadar hukum yang terbentuk belum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat
			Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Masih belum maksimalnya pelaksanaan penyuluhan hukum di masyarakat
			Jumlah JFT Penyuluh hukum yang terbentuk	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah
				Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi
		Jumlah Media Pemberdayaan masyarakat yang diproduksi	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan penyuluhan hukum	
	Pembiayaan aplikasi penyuluh hukum belum tersedia			
	Terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/Masyarakat Miskin	Jumlah Pengawasan pemberian bantuan dan penyaluran dana bantuan hukum diseluruh Kantor Wilayah	Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal	

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN
 Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di setiap wilayah	Desa sadar hukum yang terbentuk belum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	Pusluh	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan <i>stake holder</i> lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan	Internal/Eksternal	C	Desa sadar hukum yang dibentuk belum sesuai dengan kriteria yang berlaku	Kementerian dan Masyarakat	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum Melaksanakan kegiatan evaluasi	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria
2	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Masih belum maksimalnya pelaksanaan penyuluhan hukum di masyarakat	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata	Pusluh	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/ <i>stake holder</i> terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah	Internal/Eksternal	C	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah	Kementerian dan Masyarakat	Memaksimalkan kegiatan penyuluhan hukum	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum merata
3	Jumlah JFT Penyuluh hukum yang terbentuk	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Pusluh	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	Internal	C	Jumlah Penyuluh Hukum belum memenuhi target kebutuhan	Kementerian dan Masyarakat	Pembentukan JFT Penyuluh hukum untuk pemenuhan formasi	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah
			Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi	Pusluh	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	Internal	C	Materi penyuluhan yang disampaikan belum optimal	Kementerian dan Masyarakat	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi
4	Jumlah Media Pemberdayaan masyarakat yang diproduksi	Kurangnya ketersediaan media pemberdayaan masyarakat dalam penyuluhan hukum	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	Pusluh	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	Internal	C	Informasi penyuluhan hukum belum maksimal diterima oleh masyarakat	Kementerian dan Masyarakat	Penyediaan media pemberdayaan masyarakat	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum
			Kurangnya <i>content</i> /materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan	Pusluh	Kurangnya kompetensi JFT penyuluhan hukum dalam pembuatan <i>content</i> /materi penyuluhan hukum	Internal	C	Informasi penyuluhan hukum belum maksimal diterima oleh masyarakat	Kementerian dan Masyarakat	Penyediaan <i>content</i> /materi penyuluhan hukum	Kurangnya <i>content</i> /materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan
5	Jumlah Pengawasan pemberian bantuan dan penyaluran dana bantuan hukum diseluruh Kantor Wilayah	Pengawasan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	Pusluh	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	Internal	C	Hasil pengawasan belum efektif mendukung tindak lanjut perbaikan pelaksanaan bantuan hukum	Kementerian dan Masyarakat	Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
2	Pelaksanakan penyuluhan hukum belum merata	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
3	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
4	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
5	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
6	Kurangnya content/materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
7	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7=3-5
1	Pelaksanakan penyuluhan hukum belum merata	20	1	10	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	10
					Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah	
2	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk sebarannya belum merata disetiap Pusat dan daerah	20	2	10	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	10
3	Penyuluh hukum yang terbentuk belum memenuhi standar kompetensi	20	3	10	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	10
4	Jumlah media pemberdayaan masyarakat yang diproduksi belum memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum	20	4	10	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	10

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
5	Kurangnya content/materi penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat melalui media pemberdayaan	15	5	10	Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum	5
6	Jangkauan pengawasan belum menjangkau ke seluruh OBH	20	6	10	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	10
7	Pembentukan desa sadar hukum belum sesuai kriteria	15	7	10	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	5
					Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan	

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	10	Mengurangi Risiko	Melakukan kerja sama/MoU dengan Pemerintah Daerah / Stack holder	Kerja sama/MoU	1	Januari - Desember	Pusluh
	Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah	10	Mengurangi Risiko	Pembentukan/pengangkatan Penyuluh Hukum	Jumlah Penyuluh hukum	50	Januari - Desember	Pusluh
2	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	10	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan sosialisasi terkait JFT Penyuluh hukum	Jumlah Sosialisasi	33	Januari - Desember	Pusluh
3	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	10	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Januari - Desember	Pusluh
4	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	10	Mengurangi Risiko	Peningkatan produksi media pemberdayaan	Jumlah media cetak	10.000	Januari - Desember	Pusluh

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum	5	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	Januari - Desember	Pusluh
6	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	10	Mengurangi Risiko	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan		Januari - Desember	Pusluh
7	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	5	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan sosialisasi pembentukan desa sadar hukum	Jumlah Sosialisasi	10	Januari - Desember	Pusluh
	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan	5	Mengurangi Risiko	Kerja sama/Mou dengan Kementerian/Lembaga terkait	Kerja sama/MoU	1	Januari - Desember	Pusluh

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusluh BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko			
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$
1	Melakukan kerja sama/MoU dengan Pemerintah Daerah / Stack holder	Kerja sama/MoU	1	1	100,0	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah/stake holder terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di pusat dan daerah	10,0	10,0	100,0
2	Pembentukan/pengangkatan Penyuluh Hukum	Jumlah Penyuluh hukum	50	50	100,0	Kurangnya jumlah penyuluh hukum di Pusat dan Daerah			
3	Pelaksanaan sosialisasi terkait JFT Penyuluh hukum	Jumlah Sosialisasi	33	33	100,0	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat pegawai menjadi penyuluh hukum, dan dukungan dari pimpinan	10,0	10,0	100,0
4	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	2	100,0	Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi Penyuluh Hukum	10,0	10,0	100,0
5	Peningkatan produksi media pemberdayaan	Jumlah media cetak	10.000	10.000	100,0	Minimnya produksi media pemberdayaan masyarakat	10,0	10,0	100,0
6	Pelaksanaan diklat JFT Penyuluh Hukum	Jumlah diklat	2	2	100,0	Kurangnya kompetensi JFT penyuluh hukum dalam pembuatan content/materi penyuluh hukum	5,0	5,0	100,0
7	Penambahan waktu pelaksanaan pengawasan	Jumlah hari pengawasan	-	-	0,0	Waktu pelaksanaan pengawasan belum ideal untuk menjangkau seluruh OBH dan penerima bantuan hukum	10,0	10,0	100,0

8	Pelaksanaan sosialisasi pembentukan desa sadar hukum	Jumlah Sosialisasi	10	10	100,0	Mekanisme pembentukan desa sadar hukum belum sesuai ketentuan yang berlaku	5,0	5,0	100,0
9	Kerja sama/Mou dengan Kementerian/Lembaga terkait	Kerja sama/MoU	1	1	100,0	Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya dalam melakukan pembinaan kepada kelompok KADARKUM dan desa atau kelurahan binaan			